

Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas

ABSTRACT

Public sphere which is popularized by Habermas is a historical review of the critical discussions in response to the political realities which happened in the 18th century society. The emergence of the internet as new media gives broader transformation, both practically and theoretically, on how public sphere occurs in the virtual world. Characteristics of the internet as media, users who access it and the information which is distributed in virtual public sphere basically become a vital point to see what the real character of public sphere in the virtual world is.

Keywords: public sphere, new media, network, information

ABSTRAK

Ruang publik sebagaimana dipopulerkan Habermas merupakan peninjauan historis terhadap diskusi-diskusi kritis sebagai respon dari realitas politik yang terjadi pada masyarakat di abad ke -18. Kemunculan internet sebagai media baru

memberikan transformasi yang lebih luas, baik secara praktis maupun teoritis, terhadap bagaimana ruang publik itu terjadi di ruang virtual. Karakteristik internet sebagai medium, pengguna yang mengakses, hingga informasi yang didistribusikan dalam ruang (publik) virtual pada dasarnya menjadi titik perhatian untuk melihat bagaimana sesungguhnya karakter dari ruang publik di dunia virtual tersebut.

Kata kunci : *public sphere*, ruang publik, media baru, jaringan, informasi.

PENDAHULUAN

Di era konvergensi media dan kemunculan internet sebagai medium yang bisa digunakan industri media dalam mendistribusikan informasi (berita), warga tidak lagi dipandang sebagai audiens dalam pengertian sekadar mengonsumsi informasi yang disajikan semata. Fasilitas internet memungkinkan karakter berita menjadi lebih luas dan pelaku industri media bukan sekadar berhenti pada fungsi untuk menginformasikan (*to inform*) semata, melainkan juga melibatkan warga untuk sama-sama membangun wacana dalam kerang demokratisasi. Konteks pembahasan soal keterlibatan warga ini akan semakin berkembang jauh ketika memasukkan bahasan mengenai *citizen journalism*.

Salah satu karakter pembeda dari media tradisional adalah media internet menyediakan kolom interaksi. Sebuah berita yang diproduksi oleh pelaku industri media pada saat berita itu dipublikasikan di internet, maka warga selaku audiens bisa menanggapi, mengkritisi, bahkan membahkan data-data terhadap berita tersebut. Jelas ini merupakan langkah baru dari kehidupan media di Indonesia, dimana selama ini media hanya menjadi satu-satunya sumber media opini publik yang membatasi bahkan menghalangi keterlibatan pembaca (*audiences*). Jika melihat situs-situs media berita dalam jaringan atau daring (*online*), beberapa kasus dengan sangat mudah ditemui untuk menggambarkan bagaimana kolom komentar berita itu menjadi ruang untuk publik berdiskusi.

Jika dalam masyarakat di sekitar abad ke -18

menempatkan kafe, salon, atau tempat-tempat perkumpulan sebagai arena dalam melakukan diskusi publik (*publik sphere*), kini internet merupakan arena virtual (*virtual sphere*) yang bisa digunakan untuk merespon realitas yang terjadi. Bukan bermaksud membuat perbandingan, dan tentu saja sangat tidak adil dan bias sekali membandingkan media baru dengan kafe sebagai ruang publik, namun ruang virtual pada dasarnya menghubungkan tidak hanya individu melainkan juga kelompok yang lebih global tanpa adanya batasan geografis. Uniknya, keterhubungan itu terwakili sebagian besar dan didominasi oleh teks sebagai bentuk komunikasi termediasi komputer dengan teks sebagai bahan utama yang mewakili pernyataan-pernyataan dalam diskusi. Selain adanya persoalan tentang keberadaan individu yang bersifat virtual dan berbentuk teks atau imej, juga yang menjadi fokus perhatian adalah kemungkinan informasi yang dibangun sebagai pendukung dalam diskusi publik adalah informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Meski beragam persoalan di atas mengiringi keberadaan internet sebagai ruang publik di dunia siber, namun makalah ini mencoba untuk memformulasikan secara teoritis bagaimana internet itu bisa menjelma sebagai arena dalam diskusi-diskusi kritis. Ditambah dengan pendekatan teoritis dalam perspektif budaya siber, juga akan diungkap bagaimana kultur yang terjadi dalam ruang virtual itu sendiri, khususnya melihat realitas yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya baik melalui wawancara mendalam, FGD maupun observasi; di samping menggunakan data-data sekunder. Penelitian ini tidak melakukan generalisasi terhadap populasi tertentu namun lebih menekankan pada kedalaman analisisnya.

PEMBAHASAN

RUANG PUBLIK HABERMAS

Term "*public sphere*" atau ruang publik lahir dari karya Jurgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (*private people*)—dalam konteks sebagai kalangan borjuis, yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik

The bourgeois public sphere may be conceived above all as the sphere of private people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor. (Habermas, 1962/1989:27)

Hal ini muncul karena adanya perubahan kultur warga dalam menanggapi regulasi maupun realitas politik di abad ke-18; seiring dengan semakin intelektualnya warga, melek media, akses terhadap karya-karya bermutu, buku sastra yang mudah didapatkan, dan juga konsumsi terhadap arah baru jurnalisme yang lebih kritis melalui berita yang dipublikasikan. Juga, merupakan upaya untuk menyediakan ruang-ruang publik sebagai arena diskusi yang kritis (*Räsonnement*) berdasarkan argumen-argumen dalam menanggapi realitas atau pemberitaan media. Ruang publik ini terpisah dari domain otoritas kekuasaan yang ada saat itu di Eropa, dan bahkan dalam konteks ini ruang publik bisa diartikan sebagai kekuatan baru dalam menyeimbangkan dan mengkritisi kebijakan yang merupakan produk otoritas yang berkuasa.

Pada dasarnya ruang publik secara historis sudah muncul di tengah-tengah masyarakat Eropa, akan tetapi ruang publik baru dalam kupasan Habermas ini tidak hanya terjadi di

Private Realm		Sphere of Public Authority
Civil society (realm of commodity exchange and social labor)	Public sphere in the political realm	State (realm of the "police")
Conjugal family's internal space (bourgeois intellectuals)	Public sphere in the world of letters (clubs, press) (market of culture products) "Town"	Court (courtly-noble society)

GAMBAR: SKEMA RUANG HABERMAS

Sumber: Jurgen Habermas, 1962/1989, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of a Bourgeois Society*, Cambridge, MA: MIT Press, hal.30.

warung kafe sebagaimana terjadi di Inggris atau di salon-salon di Perancis, melainkan juga terjadi di ruang-ruang baca, maupun tempat-tempat pertemuan khusus dengan keterlibatan warga yang jauh lebih berbeda secara komposisi, debat yang tidak berhenti pada debat kusir, dan juga orientasi dari topik-topik yang diangkat sebagai fokus debat.

Meski ruang publik di abad tersebut dikuasai oleh kalangan borjuis, banyak para akademisi yang mengkritisnya, namun Habermas memunculkan apa yang disebutnya sebagai "*institutional criteria*" (Habermas, 1962/1989:36). Sebuah karakter yang bisa mengantarkan kita memahami apa yang dimaksud Habermas dengan ruang publik tersebut. Kriteria pertama adalah pengabaian terhadap status (*disregard of status*) atau lebih tepatnya menjauhi diskusi kritis tentang status. Ruang publik tidaklah memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa, tetapi adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan/mengkritisi sebuah realitas. Bukan pula upaya untuk menciptakan publik yang setara di kafe, salon, atau di antara anggota perkumpulan. Ruang publik lebih menekankan adanya ide-ide yang terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif sehingga bisa diterima oleh publik secara luas; yang jika tidak terealisasikan, minimal ide tersebut melekat secara sadar di benak publik.

Kriteria kedua adalah fokus pada *domain of*

common concern. Bahwa realitas historis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya oleh otoritas yang berkuasa dan atau oleh kalangan gereja. Padahal domain tersebut bisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas. Filsafat, seni, dan sastra yang diklaim hanya boleh diinterpretasikan dan menjadi kewenangan eksklusif dalam hal publisitas oleh kalangan gerejawi, menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh publik. Karya-karya tersebut bukan lagi berada dalam kebutuhan untuk bisa diakses, melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh industri. Distribusi karya-karya tersebutlah yang menjadi bahan dalam diskusi kritis yang terjadi di ruang publik. Interpretasi menjadi lebih beragam dan bisa berasal dari siapa saja dalam anggota ruang publik tersebut.

Kriteria terakhir adalah inklusif (*inclusivity*). Bahwa betapapun eksklusifnya publik dalam kasus tertentu, akan tetapi dalam ruang publik ia menjadi bagian dari kelompok kecil tersebut. Ide-ide yang muncul dalam perdebatan khusus mereka pada dasarnya bukan menjadi milik mutlak anggota ruang publik, melainkan ketika disebarkan melalui media publik dapat pula mengaksesnya. Isu-isu yang diangkat sebagai bahan diskusi menjadi lebih umum, karena setiap orang bisa mengakses sumber-sumber yang terkait dengan isu tersebut. Setiap orang pada dasarnya di ruang publik itu menemukan dirinya bukan

sebagai publik itu sendiri, melainkan seolah-olah menjadi juru bicara, dan bahkan mungkin sebagai guru dari apa yang dikatakan sebagai publik itu sendiri yang menurut Habermas sebagai perwakilan atau bentuk baru representasi borjuis.

Ruang dalam pembahasan Habermas juga mengangkat apa yang disebutnya sebagai “*private sphere*” dan “*intimate sphere*” (Habermas, 1962/1989:55). *Private sphere* adalah ruang yang berada dalam hubungan ekonomi atau pasar dan lebih disebut sebagai ruang kepemilikan. Kaum borjuis adalah orang-orang yang dalam konteks ini disebut sebagai *private persons*. Sementara ruang keluarga yang disebut sebagai *intimate sphere* merupakan inti dari *private sphere* tersebut. Sebagai *private persons* kalangan borjuis ini memiliki dua hal, yakni kepemilikan atas barang dan juga pekerja. Inilah yang menjadi semacam ambiguitas dari ruang publik di mana keberadaan *private sphere* menjadi tak terelakkan tercampur. Ada suara, untuk tidak menyebutkan kepentingan, bahwa ruang publik yang ia sebagai *private persons* terlibat dalam diksusi kritis terhadap sebuah realitas politik, yang pada dasarnya mewakili statusnya sebagai kaum borjuis dan kekhawatiran terhadap regulasi yang mungkin akan mengganggu *private sphere* mereka.

Namun, Habermas juga menekankan bahwa dalam ruang publik sebenarnya kalangan borjuis itu secara sadar maupun tidak, mewakili dua identitas di dalam dirinya sebagai publik. Diri sebagai pemilik kapital atau pekerja yang dengannya ia harus mewakili suara ruang pribadi tersebut dengan mengaitkannya sebagai kepentingan publik dan juga sebagai warga yang murni dan sederhana.

The fully developed bourgeois public sphere was based on fictitious identity of the two roles assumed by the privatized individuals who came together to form a public: the role of property owners and the role of human beings pure and simple (Habermas, 1962/1989:56).

Jika ditarik sebuah kesimpulan sederhana, ruang publik Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana

moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis, dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik. Walau karya Habermas memfokuskan diri pada ruang publik dari masyarakat borjuis, namun melalui batu loncatan itulah ruang publik bisa dipahami sebagai ruang yang menyediakan dan melibatkan publik secara lebih luas dalam mendiskusikan realitas yang ada.

ANTARA *PUBLIC SPHERE* DAN *PUBLIC SPACE*

Ruang siber atau *cyberspace* pada dasarnya menyediakan apa yang disebut Jones (1997:22) sebagai “*new public space*”. Secara digital, karakteristik *public space*, atau dengan menyebutnya sebagai *virtual space*, bisa dimaknai sebagai sesuatu yang umum atau yang sifatnya pribadi, antarbudaya atau lintas bahasa, hingga pada publik yang terkontrol atau yang bebas. Ibarat alun-alun, di mana kita bisa menemukan beragam karakteristik termasuk juga latar belakang entitas yang berada di sana. Meski siapa saja bisa berada dalam alun-alun, namun tidak berarti otomatis kita menjadi bagian dari ruang tersebut; kita bisa menemukan entitas yang berkelompok di salah satu sudut alun-alun, tetapi kita tidak bisa begitu saja masuk dalam kelompok mereka.

Virtual space tidaklah sama dengan tipe media tradisional seperti radio, televisi atau penerbitan dan juga tidak pula sejenis dengan pengertian *public spaces* secara tradisional dalam kehidupan nyata. Ruang siber memberikan dan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya (Camp and Chien, 2000). Realitas di ruang siber inilah yang menjadikan internet sebagai ruang terbuka bagi siapa saja untuk berinteraksi atau sekadar mengkonstruksi diri; meski dalam term Castells (2001) dan Van Dijk (2006) siapapun yang melakukan koneksi maka secara otomatis ia sudah menjadi bagian dari atau anggota masyarakat jejaring (*network society*).

Namun, perlu ditegaskan bahwa apa yang disebut sebagai *public space* tidaklah serta merta sama dengan *public sphere* sebagaimana dimaksud oleh Habermas. Sebab, internet bisa dikatakan hanya sebagai medium yang bisa digunakan untuk diskusi atau debat politik, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas politik. Namun, fungsi ini sama juga dengan penggunaan internet sebagai sarana virtual semata; internet bisa menjadi medium yang dilekatkan pada realitas masyarakat apa saja, tergantung dari pengguna yang mengaksesnya. Karena itu, Papacharissi (2002:11) menegaskan bahwa “*A virtual space enhances discussion; a virtual sphere enhances democracy*”.

Konteks *virtual public space* bisa dilihat dari bagaimana pengguna internet memanfaatkan fasilitas seperti situs jejaring sosial *Facebook* atau *Twitter*. Keberadaan *wall* atau dinding sebagai tempat pengguna untuk menyampaikan ide, mempublikasikan pendapatnya, atau menginformasikan suatu realitas politik tidak serta-merta dikatakan sebagai upaya pengguna dalam debat kritis sebagaimana yang terjadi di ruang publik. Hal itu hanya sekadar refleksi pengguna saja atas sebuah realitas; meski dalam dinding tersebut tersedia kolom untuk bisa dikomentari atau bisa juga ditanggapi (*retweet*) oleh pengguna lain, akan tetapi interaksi yang terjadi merupakan tanggapan biasa sebagaimana ketika antarpengguna berinteraksi dalam komunikasi tatap muka.

Situs jejaring sosial juga bisa menjadi media dalam konstruksi identitas pengguna. Publikasi status, foto, atau tautan yang ada pada dasarnya hanyalah bentuk dari upaya pengguna untuk menampilkan dirinya di wilayah pribadi, hanya saja dalam konteks ini wilayah pribadi itu secara virtual. Logika sederhananya seperti ini, apakah saat pengguna mempublikasikan foto diri dan di belakangnya terdapat gedung sebuah partai politik kita bisa langsung mengatakan bahwa si pengguna adalah anggota dari partai politik tersebut?

Bahwa akses pengguna dalam situs jejaring sosial atau bahkan ketika membuat situs merupakan upayanya untuk merefleksikan diri sebagaimana Cheung (2000:44) menyebutnya sebagai “*a reflexive presentation and narrativization of the self*”. Sehingga bisa dikatakan bahwa internet merupakan panggung depan yang belum tentu juga merepresentasikan diri yang sebenarnya di panggung belakang (Goffman, 1959).

Sedangkan dari sisi keberadaan pengguna, internet telah mentransformasikan perannya secara beragam. Bagi Habermas (2006) sendiri, keberadaan internet telah memperluas sekaligus mengfragmentasikan konteks komunikasi. Meski dalam kasus tertentu ia memiliki pengaruh terhadap kehidupan intelektual, namun di sisi lain keberadaan internet membangun komunikasi yang nonformal, saluran komunikasi yang terhubung secara horisontal antar entitas, dan bahkan menjadi alternatif dalam memperoleh informasi selain media tradisional. Yang menjadi persoalan adalah informasi yang lalu-lalang di dalam jaringan terkadang menjadi informasi yang kurang fokus, tanpa edit, dan dalam kondisi tertentu kita tidak bisa mengetahui mana informasi yang asli dan mana yang palsu (Jordan, 1999:117). Juga, keberadaan intelektual dalam ruang publik virtual menjadi termarjinalisasikan.

This focuses the attention of an anonymous and dispersed public on select topics and information, allowing citizens to concentrate on the same critically filtered issues and journalistic pieces at any given time. The price we pay for the growth in egalitarianism offered by the Internet is the decentralised access to unedited stories. In this medium, contributions by intellectuals lose their power to create a focus. (Habermas, 2006)

Grup-grup diskusi maupun forum perbincangan politik maupun aksi-aksi sebagai respon dari realitas politik di daring merupakan salah satu perwujudan ruang publik di era internet saat ini sebagai pengganti ruang baca, perpustakaan, kafe, dan tempat-

tempat sebagaimana disebutkan Habermas sebagai fasilitas dalam diskusi intelektual telah menjelma menjadi apa yang disebut Poster (1995) sebagai *virtual sphere* atau ruang virtual. Ruang virtual yang memfasilitasi publik untuk melakukan interaksi melalui beragam jenis komunikasi internet, mulai dari satu kebanyakan entitas atau dari banyak ke banyak hingga penggunaan fasilitas beragam interaksi (Trevor Barr, 2000:118).

Melalui pendekatan kultural, ruang publik internet atau *virtual sphere* memberikan/melahirkan budaya baru dalam proses demokratisasi. Tidak ada lagi batasan antara borjuis dan proletar, batasan gender menjadi kabur, dan siapa saja bisa melibatkan dirinya dalam debat intelektual di ranah politik. Sebuah isu bahkan bisa menjadi informasi yang sangat cepat tersebar dan langsung bisa dijadikan topik perdebatan (Jordan, 1999:115). Juga, ini merupakan efek yang tidak bisa terelakkan, ruang virtual menyuburkan gerakan yang beragam, mulai dari gerakan akar rumput hingga aktivitas terorisme yang menggunakan internet sebagai ruang bebas untuk menyebarkan paham dan keyakinan tentang kekuasaan pemerintah saat ini, termasuk di Indonesia (Lim, 2002; Castells, 1997, 2001; Harlon & Johnson, 2011).

The virtual sphere allows the expression and development of such movements that further democratic expressions, by not necessarily focusing on traditional political issues, but by shifting the cultural ground (Papacharissi, 2007:14).

Internet juga merupakan ruang yang bisa melibatkan siapa saja. Mengkritisi ruang publik Habermas, bahwa ruang virtual melahirkan beragam bentuk ruang publik yang tidak hanya diisi oleh kalangan borjuis semata, melainkan melibatkan entitas yang lebih beragam. Ruang virtual juga beroperasi mulai dari level personal hingga global, dan juga melibatkan publik yang tidak mesti setara dalam membicarakan tentang kebijakan maupun aktivitasnya (Keane, 2000; Rycroft, 2007; Kahn & Kellner, 2004).

MEMPERTANYAKAN PERAN RUANG (PUBLIK) VIRTUAL

Ketika membicarakan ruang publik ala Habermas, pada dasarnya ada dua pertanyaan penting yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum membicarakan ruang (publik) virtual. Pertanyaan itu, atau lebih tepatnya kritik, dalam konteks ini meminjam kritik yang diajukan oleh Fraser (2007:7-30) yakni "*the legitimacy critique*" dan "*the efficacy of public opinion*". Kritik pertama menekankan pada seberapa jauh legitimasi itu berada dalam wacana yang dikonstruksi dalam debat-debat kritis tersebut. Pasalnya, ruang publik yang terjadi adalah ruang publik yang sangat bias dari keterwakilan apalagi dengan kondisi struktur masyarakat saat itu yang sangat kental dengan pembagian kelas. Oleh karena itu, ruang publik yang ada pada dasarnya tidak mewakili mereka yang berstatus sebagai bukan pemilik modal, miskin, wanita, agama, dan sebagainya. Kritik selanjutnya terkait dengan apakah wacana yang dihasilkan dari debat kritis itu dapat tersuarakan sehingga diperhatikan oleh pemegang kekuasaan, dalam hal ini penyelenggara negara dan pemerintah. Sebab, selalu ada kepentingan jika terkait dengan pemerintah dan juga masyarakat kapitalis saat itu. Ini bisa saja menyebabkan arus komunikasi dari wacana yang dibangun tidak pernah sampai kepada pengambil keputusan atau sebaliknya, para pengambil keputusan itu yang tidak bisa menjangkaunya.

Terhadap kritik pertama Fraser, perkembangan masyarakat jejaring saat ini telah membuka peluang bagi semua kalangan dari beragam latar belakang kelas untuk terlibat aktif dalam diskusi publik dan mengkonstruksi wacana sebagai respon dari realitas politik atau proses demokratisasi. Meski tetap saja ada kritik yang menyatakan bahwa ruang-ruang virtual untuk diskusi dan debat terlalu banyak (*overload*), namun disinilah pengguna bisa menentukan pilihan ruang virtual mana yang bisa mereka ikuti. Sementara dalam kritik kedua pada dasarnya juga menjadi kritik yang sama ketika

membincangkan soal ruang virtual.

Secara lebih spesifik, Benkler (2006:10-16) memberikan kritik tentang bagaimana ruang virtual—Benkler menyebutnya dengan “*networked public sphere*”—itu rentan terhadap persoalan. Internet memungkinkan siapa saja untuk berbicara atau mendistribusikan informasi dan ketika semua orang berbicara siapa yang akan mendengar, itulah apa yang disebut Benkler dengan “*Babel Objection*”. Terlalu banyaknya informasi yang berlalu-lalang di ruang virtual juga membuka kemungkinan-kemungkinan informasi yang diunggah itu hanya sekadar rumor, palsu, atau *hoax* pada dasarnya akan membawa pada debat yang terfragmentasi dan tidak menutup kemungkinan komunitas politik virtual yang terbentuk akan lenyap begitu saja.

Keberadaan internet yang tidak selalu bersifat desentralisasi juga menjadi kritik terhadap ruang virtual bagi Benkler. Jutaan bahkan milyaran situs yang berada di internet merupakan jumlah yang cukup banyak bagi pengguna untuk bisa memilah dan menentukan mana ruang virtual yang sesuai dengan aspirasi dan tentu saja menjunjung tinggi proses demokrasi melalui debat kritis namun demokratis. Banyaknya ruang virtual yang dilandasi dengan tujuan atau motif yang melandasinya pada titik tertentu bisa menempatkan hasil debat kritis yang dihasilkan di ruang virtual tersebut tidak memiliki dukungan yang cukup kuat.

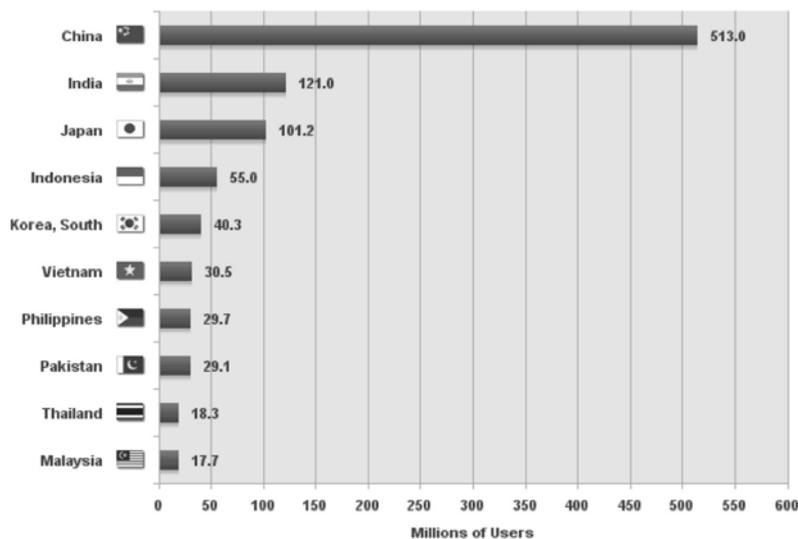
Di bandingkan dengan media tradisional seperti koran, televisi, dan radio, keberadaan internet sebagai ruang virtual juga tidak bisa menggantikan peran pengawasan (*watchdog*). Media tradisional dengan sejarah panjang kemunculannya serta keterbatasan pengguna dalam mengakses internet, khususnya di negara berkembang, menjadi dua sisi yang bisa saling bertentangan. Sifat media yang menjangkau pelosok desa dan juga pola transmisi pesan *broadcast media* (Holmes, 2005) memungkinkan opini yang dibangun berdasarkan satu suara, dilampiri oleh alasan demi alasan, dan juga bisa membangun

kepercayaan dalam benak audiens. Meski bagi Benkler media tradisional ketika telah menguasai pasar memberikan kesempatan kepada pemilik media untuk membangun opini serta informasi menurut versi mereka dan keberadaan internet sebagai ruang virtual bisa menyeimbangkannya, namun fokus audiens masih jauh lebih besar kepada media tradisional dibandingkan dengan internet.

Kritik terhadap ruang virtual juga bisa muncul dari apa yang dikatakan sebagai “*digital divide*”; dalam konteks ini penulis memandangnya dalam dua sudut berbeda, terkait akses dan perangkat. Sama halnya dengan ruang publik Habermas, bahwa di ruang virtual juga terjadi apa yang disebut pembatasan keterlibatan pengguna terhadap sebuah komunitas diskusi politik. Perangkat seperti grup di *Facebook* atau milis seperti *Yahoo Groups* memberikan peluang bagi pengelola grup untuk membatasi siapa saja dalam mengakses informasi. Selain itu, akses terhadap internet dan ruang-ruang virtual juga terkendala oleh kemampuan warga dalam memiliki atau menggunakan perangkat teknologi. Data statistik dari (<http://www.internetworldstats.com/asia/id.htm>) yang diakses penulis pada 11 Juli 2012 menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia diperkirakan berjumlah 30 juta pengguna atau sekitar 12,3 persen dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, maka Indonesia hanya berada di urutan ke empat setelah Cina, India, dan Jepang sebagaimana gambar berikut:

Jumlah 30 juta sebagaimana yang dilansir tersebut tidaklah mewakili pengguna yang dipastikan akan terlibat dalam diskusi kritis di ruang virtual. Ada beragam alasan pengguna dalam mengakses internet dari sekadar untuk merespon realitas politik. Apalagi dengan maraknya situs jejaring sosial semacam *Facebook* atau *Twitter* yang terkadang lebih digunakan pengguna hanya untuk memperbarui status di dinding atau menuliskan aktivitas keseharian.

Asia Top Internet Countries December 31, 2011



Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats3.htm
2,267,233,742 Internet users in the World estimated for 2011 Q4
Copyright © 2001-2012, Miniwatts Marketing Group

GAMBAR STATISTIK NEGARA PENGGUNA INTERNET TERBESAR DI ASIA PADA TAHUN 2011

SIMPULAN

Terkoneksinya entitas secara global serta beragamnya media komunikasi dan atau interaksi melalui perangkat internet memberikan peluang baru terciptanya ruang virtual bagi demokrasi. Namun, kenyataan juga tidak bisa dibantah bahwa koneksi entitas yang dalam segi kuantitas terbilang banyak tersebut tidak menutup kemungkinan ruang virtual tersebut menjadi tidak demokratis dan eksklusif dengan anggota yang memiliki kepentingan pribadi dibandingkan publik.

Juga, kita tidak bisa dielakkan bahwa ruang virtual pada kenyataannya tidak berbeda dari ruang publik yang secara historis digiatkan oleh kalangan borjuis. Palsunya, tidak semua warga bisa mengakses internet dan hanya warga yang memiliki kepemilikan terhadap komputer dan koneksi internetlah—disebut sebagai “*bourgeois computer holders*” (Fraser, 1992)—yang bisa terlibat dalam ruang virtual tersebut.

Persoalan ini setidaknya bisa diantisipasi dengan kesadaran diri terhadap entitas yang akan terlibat dalam ruang virtual. Melalui medium komunikasi alternatif seperti internet, setidaknya entitas diberi kesempatan lebih luas

untuk bertukar pikiran terhadap kepentingan publik dan juga sebagai penjaga terhadap kebijakan-kebijakan pengemban amanah politik yang merugikan publik. Proses penyadaran diri ini bagi Dean (2003) lebih mencerminkan apa yang disebut Levi Strauss sebagai “*zero institution*”. Term ini digunakan Levi untuk menjelaskan keberadaan institusi atau kelompok warga yang tidak berdasarkan fungsi atau tujuan dari anggota kelompoknya. Artinya, setiap entitas yang berada dalam ruang virtual menyadari bahwa mereka bertindak sebagai anggota dari ruang virtual itu. Latar belakang demografis atau ideologi politik yang dianut oleh entitas menjadi terabaikan ketika berada di ruang virtual; wacana yang dibangun pun berdasarkan diskusi kritis dan debat yang ilmiah demi kepentingan publik. Sebab, Dean melihat internet pada dasarnya merupakan tempat tumbuhnya konflik apabila para aktivis (politik) dari beragam bendera berinteraksi di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Benkler, Yochai. 2006. *The Wealth of Networks: How*

- Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haden and London: Yale University Press.
- Castells, Manuel. 1997. *The Information Age: Economy, Society & Culture, Vol.2: The Power of Identity*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Castells, Manuel. 2001. *The Internet Galaxy*, Oxford: Oxford University Press.
- Cheung, Charles. 2000. *A home on the web: presentations of self on personal home-pages*, dalam D. Gaultlet (ed.), *Web.Studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age*. London: Arnold.
- Habermas, Jurgen. 1962/1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of a Bourgeois Society*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Hine, Christine. 2000. *Virtual Ethnography*, London, Thousand Oaks, New Dehli: SAGE Publication.
- Ingram, David. 2010. *Habermas, Introduction and Analysis*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Pusey. 1987. *Jurgen Habermas*. London and New York: Routledge.
- Rycroft, Alan E. 2007, *Young Adults and Virtual Public Spheres: Building a New Political Culture*, <http://sunshinecommunications.ca/articles/virtual_public_spheres.pdf> (diakses pada 28 Januari 2012), Victoria, Canada: Royal Roads University.
- Thompson, John B. 1981. *Critical Hermeneutics, A Study in the Thought of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas*. New York: Cambridge University Press.
- Van Dijk, Jan. 2006. *The Network Society*. London: SAGE Publications.
- REFERENSI LAIN :**
- Barlas, Mehmet Adnan dan Caliskan, Olgu. 2006. "Virtual Space as a Public Sphere; Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design", dalam Jurnal METU JFA. Vol.23. No.2.hal.1-20.
- Beers, David. 2006. *The Public Sphere and Online, Independent Journalism*, dalam *Canadian Journal of Education*. Vol.9. No.1. hal.109-130.
- Camp, Jeand and Chien, Y.T.2000. "The Internet as Public Space: Concepts, Issues, and Implications in Public Policy", dalam jurnal *ACM SIGCAS Computers and Society*, Volume 30 Issue 3, September 2000, p.13 - 19 <<http://www.ljean.com/files/spaces.html>> (diakses pada 9 Juli 2012).
- Dahlberg, Lincoln. 2001. *Extending the Public Sphere Through Cyberspace: The Case of Minnesota E-Democracy*, dalam jurnal elektronik *First Monday*, Volume 6, No.3, 5 Maret 2001 <<http://www.firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/838/747>> (diakses pada 7 Juli 2012).
- Crang, M. 2010. "Cyberspac as the New Public Domain", dalam *Urban Diversity: Space, Culture and Inclusive Pluralism in Cities Worldwide*. Baltimore. MD: John Hopkins University Press; Woodrow Wilson International for Scholars.hal.99-122.
- Dean, J. 2003. *Why the Net is Not a Public Sphere*, dalam jurnal *Constellations*. Vol.10. No.1. Hal.95-112.
- Fraser, Nancy. 2007. "Transnationalizing the Public Sphere, On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian World", dalam jurnal *Theory, Culture & Society*. Vol.24. No.4. Hal.7-30 <<http://eicpc.net/transversal/0605/fraser/en>> (diakses pada 11, Juli 2012).
- Goldberg, Greg. 2010. *Rethinking the Public/Virtual Sphere: The Problem With Participation*, dipublikasikan pada 6 Desember 2010 <<http://nms.sagepub.com/content/13/5/739>> (diakses pada 28 Januari 2012).
- Habermas, Jurgen. 2006, <<http://derstandard.at/2372764>> (diakses Desember 2012)
- Harlon, Summer & Johnson, Thomas J.2011. "Overthrowing the Protest Paradigm", dalam *International Journal of Communication*. Vol.5.hal.1359-1374.
- Lim, M. 2002. "Cyber-civic Space in Indonesia", dalam *International Development Planning Review*, Vol.24, No.4, hal 383-400.
- Lunat, Ziyaad.2008. "The Internet and the Public Sphere: Evidence from Civil Society in Development Countries", dalam *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, Vol.35. No.3.hal.1-12.
- Papacharissi, Zizi.2002. "The Virtual Sphere, The Internet as a Public Sphere", dalam *Jurnal New Media & Society*, Vol 4. No.1.hal.9-27.
- Ubayasiri, Kasun.2007. "Internet and the Public Sphere" <<http://ejournalist.com.au/v6n2/ubayasiri622.pdf>> (diakses pada 28 Januari 2012).
- White, David S., & Le Cornu, Alison. 2011. "Visitors and Residents: A New Typology for Online

Engagement”, dalam jurnal elektronik *First Monday*, Volume 6, No.9, 5 September 2011 <<http://www.firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3171/3049>>(diakses pada 7 Juli 2012).
